

**KONDISI SOSIAL EKONOMI DAN BUDAYA MASYARAKAT
SEKITAR KAWASAN KONSERVASI : STUDI KASUS DI PULAU GAG,
RAJA AMPAT, PAPUA BARAT
(*Social Economic and Culture Conditions Of Community Around
Conservation Area: Case Study at Gag Island, Raja Ampat,
West Papua*)**

Baharinawati W. Hastanti¹⁾ dan R. Gatot Nugroho Triantoro²⁾

^{1), 2)} Peneliti pada Balai Penelitian Kehutanan Manokwari
Jl. Inamberi Susweni Kotak Pos 159 Manokwari
Email : baharina_06@yahoo.co.id dan baharinawati@gmail.com

ABSTRACT

This study was aim to know the social, economic and cultural communities on the island of Gag, a nickel mining sites in the Marine Wildlife of the Raja Ampat Islands. In last years the region enter into a conflict between the central government (Ministry of Forestry) and the local government supported by the community. The conflict occurred because of a lack of public understanding of conservation of natural resources and the presence of nickel mining was expected to improve the welfare of local communities. Lack of public understanding of conservation is influenced by socio-economic conditions and local culture is partly because of geographical isolation, low levels of education and the difficulty of economic development. These factors led to the economic motivation of nickel mining in the region hope was forwarded to the exclusion of ecological impacts would arise from the nickel mining project.

Keywords: Social, economic, cultural, community, conservation area, Raja Ampat

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di Pulau Gag, Papua Barat terkait persepsi masyarakat pada penambangan nikel di kawasan konservasi Kepulauan Raja Ampat. Dalam beberapa tahun terakhir kawasan di Pulau Gag menjadi konflik antara Kementerian Kehutanan didukung Lembaga Swadaya Masyarakat dengan Pemerintah daerah yang didukung masyarakat. Konflik terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konservasi sumberdaya alam. Di sisi lain penambangan nikel yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pemahaman masyarakat terhadap kawasan konservasi dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat. Kondisi seperti isolasi geografis, rendahnya tingkat pendidikan dan rendahnya pendapatan masyarakat menyebabkan adanya motivasi ekonomi masyarakat agar penambangan nikel di wilayah ini diteruskan dengan mengesampingkan dampak negatif ekologis yang akan timbul dari penambangan nikel.

Kata kunci : Sosial ekonomi , budaya, kawasan konservasi, Raja Ampat

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pulau Gag termasuk dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Wilayah ini sebagian besar adalah kawasan konservasi yang terdiri atas pulau-pulau. Kementerian Kehutanan menginginkan agar Pulau Gag tetap dijadikan hutan lindung dipihak lain Kementerian Pertambangan menginginkan eksploitasi terhadap potensi nikel yang terdapat di pulau tersebut. Pada akhirnya perusahaan BHP Billiton sebagai perusahaan tambang mengumumkan penghentian penambangan nikel di pulau Gag.

Ada dua alasan pokok Kementerian Kehutanan didukung oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tidak setuju dengan rencana pertambangan di pulau Gag sebagai berikut:

1. Kawasan laut Raja Ampat merupakan kawasan laut yang menempati urutan pertama dalam usulan oleh PBB (UNESCO) sebagai kawasan warisan dunia (*world heritage*) karena mempunyai kekayaan hayati laut dan menyimpan 64% kekayaan terumbu karang dunia (McKenna et al., 2002).
2. Pertambangan nikel di pulau Gag akan dilakukan melalui metode pembuangan tailing ke laut, STD (*Submarine Tailings Disposal*). Sistem ini menyebabkan kekuatiran para pemerhati lingkungan hidup karena limbah tailing mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3) yang dapat memusnahkan kehidupan laut bahkan mengancam keselamatan manusia yang mengkonsumsi ikan yang terkontaminasi limbah tailing (MinergyNews, 2001.).

Sebagian masyarakat Pulau Gag dengan kondisi sosial, ekonomi dan budaya sedemikian rupa mulai mempertanyakan mengapa pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan menetapkan Pulau Gag sebagai kawasan lindung tanpa ada penelitian dan pengkajian terlebih dahulu. Sepengetahuan masyarakat yang sudah bertahun-tahun secara turun temurun bermukim di kawasan ini beranggapan bahwa tidak ada yang istimewa pada kawasan ini untuk dijadikan kawasan lindung yang dalam pengertian secara awam merupakan kawasan yang harus dilestarikan keberadaan flora dan fauna yang langka. Sementara itu Pemerintah Kabupaten Raja Ampat ingin memberikan ijin penambangan karena dampaknya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan SK Menhut No. 81/Kpts-II/1993 tertanggal 16 Februari 1993, Kepulauan Raja Ampat adalah salah satu Suaka Margasatwa Laut (*Marine Wildlife Sanctuary*). Ini berarti bahwa Pulau Gag tidak dimungkinkan untuk dieksplorasi maupun dieksploitas,i sebagaimana UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa Suaka Margasatwa merupakan kawasan konservasi yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian.

Penambangan nikel di Pulau Gag dikuawatirkan akan mengancam keanekaragaman hayati laut di Kepulauan Raja Ampat karena kegiatan tersebut akan menimbulkan dampak ekologis negatif pada masa mendatang. Pembuangan limbah (*tailing*) yang mengandung logam berat (Mercuri dan Sianida) ke laut akan merusak dan mencemari biota laut, sehingga akan merusak ekosistem bawah laut. Hal ini juga berbahaya pada masyarakat yang mengkonsumsi hasil laut yang sudah tercemar oleh logam berat tersebut (Jatam, 2006).

Berhentinya penambangan nikel di Pulau Gag menyebabkan hilangnya impian masyarakat setempat yang berharap adanya peningkatan taraf hidup dengan beroperasinya perusahaan tambang. Keberadaan perusahaan akan meningkatkan perekonomian daerah dengan terbukanya isolasi kawasan, mempermudah pemasaran hasil bumi, pembukaan kesempatan kerja dan membuka kesempatan berusaha.

Anggapan masyarakat bahwa penambangan akan berdampak positif bagi mereka dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan tersebut. Oleh sebab itu perlu dipelajari kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan Pulau Gag.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan Pulau Gag terkait dengan persepsi masyarakat pada penambangan nikel di kawasan konservasi.

II. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak tahun 2006 sampai tahun 2010. Waktu wawancara dilakukan pada bulan Juli sampai Agustus 2006 di Kampung Gambir, Distrik Waigeo Barat, Kabupaten Kepulauan Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Penyebutan kampung menunjuk pada desa, sedangkan distrik sama artinya dengan

kecamatan, merupakan istilah administrasi pemerintahan di Papua sebagai penghargaan atas pelaksanaan Otonomi Khusus sesuai dengan UU No 21 Tahun 1999.

B. Alat dan Bahan Penelitian

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah tape recorder, kamera, alat tulis menulis, pedoman wawancara.

C. Metode Penelitian

1. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui pengamatan dan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap beberapa informan dengan panduan berupa pedoman wawancara dengan jenis pertanyaan terbuka. Penentuan informan dilakukan secara *purposive* dengan pertimbangan 1) Menetap di Pulau Gag dalam jangka waktu 5 tahun terakhir secara terus menerus, 2) mengetahui dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan aspek penelitian antara lain aspek sosial, ekonomi dan budaya. Data sekunder berupa monografi desa, laporan tahunan dan publikasi ilmiah diperoleh dari kantor desa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait antara lain Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) dan *Conservation Internasional* (CI) serta perusahaan (PT Gag Nikel).

2. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Sedangkan Rumus-rumus yang digunakan adalah:

$$(a) \text{ Rasio Jenis Kelamin (RJK)} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Wanita}}{\text{Jumlah Penduduk Pria}} \times 100\%$$

$$(b) \text{ Kepadatan penduduk (DK)} = \frac{\text{Jumlah Penduduk}}{\text{Luas Wilayah}}$$

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Demografis dan Kependudukan

1. Jumlah dan Sebaran Penduduk

Jumlah penduduk (Tahun 2009) di Kampung Gambir seluruhnya adalah 633 jiwa termasuk dalam 133 Kepala Keluarga (KK), terdiri dari 345 orang pria dan 288 orang wanita. Perbandingan antara jumlah penduduk wanita dan pria adalah 83,48%, sehingga jumlah penduduk pria lebih banyak dari wanita. Penduduk Kampung Gambir tersebar dalam empat wilayah Rukun Tetangga (RT), dengan jumlah penduduk

terbanyak bermukim di RT III, yaitu 201 orang. Apabila ditinjau dari luas Pulau Gag yang 7.727 hektar, maka kepadatan penduduk adalah 0,08 orang per hektar, sehingga daerah ini termasuk dalam tingkat kepadatan yang sangat rendah.

Di bawah ini adalah tabel sebaran penduduk di Pulau Gag, Kabupaten Kepulauan Raja Ampat.

Tabel (Table) 1. Jumlah dan Sebaran Penduduk di Pulau Gag 2009 (*Number and Distribution of Population at Gag Island*)

Wilayah (Area)	Jumlah Jiwa <i>Number of People</i>	Jumlah KK <i>Number of Household</i>	Jenis Kelamin (<i>Gender</i>)	
			Pria (Male)	Wanita (Female)
RT. I	137	28	73	64
RT. II	131	26	72	59
RT. III	201	47	111	90
RT. IV	164	32	89	75
Jumlah	633	133	345	288

Sumber (Source) : Monografi Kampung Gambir (*Monograph of Gambir Village*), 2009

Jumlah penduduk yang mendiami suatu wilayah akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat apabila dihubungkan dengan jumlah pendapatan masyarakat. Semakin besar jumlah penduduk yang mendiami suatu wilayah maka akan semakin besar beban tanggungan ekonomi masyarakat. Apalagi jika sebagian besar penduduk yang berusia produktif ternyata tidak bekerja atau tidak mempunyai penghasilan. Jumlah pendapatan suatu masyarakat di suatu wilayah akan mempengaruhi daya beli, perputaran uang dan tingkat inflasi di daerah tersebut.

2. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk di Kampung Gambir tergolong rendah, sebagian besar berpendidikan Sekolah Dasar (SD) berjumlah 293 orang (46,29%) dan tidak bersekolah sebanyak 159 orang (25,12%). Hal itu disebabkan terbatasnya akses pendidikan yang dapat dienyam penduduk. Pendidikan menjadi suatu hal yang mahal karena pendidikan yang dapat dienyam di Pulau Gag hanya sampai pada tingkat Sekolah Dasar (SD). Untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, masyarakat harus mengeluarkan biaya yang besar karena harus melanjutkannya di luar Pulau Gag. Tingkat pendidikan penduduk di Pulau Gag disajikan pada Tabel 2. :

Tabel (Table) 2. Tingkat Pendidikan Penduduk di Pulau Gag 2009 (*Level education of Population at Gag Island*)

Wilayah (Area)	Pendidikan Formal (<i>Formal Education</i>)				
	Tidak Sekolah <i>Not educated</i>	SD <i>Elementary School</i>	SLTP <i>Junior High School</i>	SMU <i>Senior High School</i>	PT <i>University</i>
RT. I	31	79	10	16	1

RT. II	39	57	22	12	1
RT. III	59	74	34	28	6
RT. IV	36	83	22	21	2
Jumlah (<i>Total</i>)	165	293	88	77	10

Sumber (*Source*): Monografi (*Monograph*) Desa Gambir, 2009

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Pulau Gag menyebabkan kurangnya pemahaman tentang makna konservasi sumber daya alam di masa mendatang. Selain itu dengan pendidikan yang relatif rendah dan kurangnya ketrampilan menyebabkan masyarakat banyak berharap akan keberadaan lapangan kerja yang dibuka perusahaan di sektor pertambangan tanpa memahami dampak negatifnya secara ekologis terhadap kehidupan generasi mendatang.

3. Agama

Sebagian besar penduduk yang mendiami Pulau Gag memeluk agama Islam yaitu sebanyak 611 orang (96,52%), sedangkan sisanya memeluk agama Kristen (3,48%). Fasilitas keagamaan yang ada berupa satu buah masjid dan satu buah gereja. Agama turut berperan serta mempengaruhi tata kehidupan masyarakat. Pemanfaatan sumber daya hutan di Pulau Gag juga dipengaruhi oleh agama yang dianut. Pada umumnya masyarakat lebih banyak memenuhi kebutuhan protein dari hasil laut, sehingga tidak mengganggu kehidupan jenis reptil maupun amphibi, karena dalam ajaran agama Islam diharamkan untuk dimakan atau dikonsumsi.

Walaupun sebagian besar masyarakat di Pulau Gag adalah pemeluk agama Islam, namun masih juga menganut kepercayaan terhadap hal-hal yang magies. Ketergantungan masyarakat yang kuat terhadap alam menyebabkan masyarakat percaya adanya kekuatan-kekuatan lain di luar Tuhan yang lebih kecil namun berpengaruh terhadap kehidupan. Oleh sebab itu ritual-ritual adat masih kuat dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh dukungan keselamatan dalam kehidupan sehari-hari.

4. Kepemilikan, Penguasaan Tanah dan Pemanfaatan Lahan

Pengelompokan sosial yang terdapat di Pulau Gag berdasarkan kekuasaan atas tanah. Kepemilikan dan penguasaan tanah umumnya didominasi oleh penduduk asli Pulau Gag yang terdiri dari 6 marga (klen/keret) yaitu : *Umsipyat*, *Umsandim*, *Magtublo*, *Magimai*, *Magbow* dan *Umlil*. Kepemilikan tanah di Pulau Gag bersifat turun temurun dan tidak diperjual belikan.

Pendistribusian hak atas tanah akan diberikan pada keturunan yang telah menikah. Pendatang yang telah berkeluarga akan diberikan tanah untuk tempat tinggal dan berkebun tetapi tidak mempunyai hak milik atas tanah. Keturunan penduduk asli Pulau Gag memiliki hak penuh atas penguasaan dan pemanfaatan atas tanah yang diberikan kepadanya. Kepemilikan dan hak penguasaan tanah yang terdapat di Pulau Gag akan mendorong kedatangan pendatang yang akan berpengaruh positif terhadap investasi dan menggerakkan roda ekonomi regional.

Pemanfaatan lahan yang ada di Pulau Gag terdiri dari lahan pemukiman dan pekarangan, landasan pesawat terbang, dusun sagu, kebun kelapa, kebun, lahan pertambangan, dan hutan sekunder. Terdapat dua pemukiman di Pulau Gag yaitu Kampung Lama dan Kampung Baru. Pemukiman Kampung Lama adalah pemukiman kuno awal masuknya penduduk asli Pulau Gag, sekarang bekas kampung tersebut telah menjadi lahan untuk kebun, yang ditandai adanya beberapa perkuburan kuno. Jarak antara Kampung Lama dan Kampung Baru kira-kira 5 Km.

Dusun sagu menyebar di sekeliling Pulau Gag pada tanah-tanah berawa dan berdekatan dengan lahan untuk kebun. Lahan untuk kebun dan kebun kelapa menyatu dan tidak terpisah. Landasan pesawat terbang yang dibangun pada masa PT. Pasifik Nikel merupakan bekas lahan kebun dan kebun kelapa. Landasan tersebut sekarang hanya berfungsi sebagai tempat penggembalaan ternak atau sekali-kali didarati pesawat terbang jenis helikopter atau twin otter yang membawa rombongan pemerintah yang melakukan kunjungan kerja. Lahan pertambangan berada pada bukit-bukit yang kering dan tandus. Kegiatan penambangan nikel menurut pihak perusahaan sudah tidak ada lagi, kecuali kegiatan eksplorasi pengambilan sampel dengan proses pengapalan untuk dikirim ke Australia, setelah sampai di Sorong.

Tanah adalah salah satu harta yang dapat diwariskan. Kepemilikan tanah yang ada di Pulau Gag umumnya diwariskan sesuai dengan hukum Islam, dimana laki-laki akan memperoleh hak yang lebih besar dari perempuan. Pengalihan hak dari orang tua kepada anaknya dilakukan ketika orang tua sudah meninggal dan anak telah berkeluarga. Selain diwariskan kepada keturunannya tanah di P. Gag juga diberikan untuk kepentingan umum (hibah), sesuai dengan hukum Islam hibah adalah pemberian yang dilakukan untuk kepentingan umum dengan harapan pemberi hibah akan mendapatkan pahala sepanjang tanah itu dimanfaatkan. Hibah tanah umumnya digunakan untuk bangunan masjid dan sekolah.

B. Mata Pencaharian dan Perekonomian

Secara umum terdapat tiga jenis mata pencaharian utama penduduk di Pulau Gag yaitu : nelayan, pegawai dan petani. Namun disamping mata pencaharian pokok tersebut, penduduk juga mempunyai mata pecaharian sampingan seperti : berkebun, meramu Sagu, membuat kopra dan Berdagang. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3. Di bawah ini :

Tabel (*Table*) 3. Jenis Mata Pencaharian Penduduk Pulau Gag (2009)

Mata Pencaharian Pokok	Jumlah (Orang)	Mata Pencaharian Sampingan	Jumlah (orang)
<i>Primary Ocupation</i>	<i>Total (People)</i>	<i>Second Ocupation</i>	<i>Total (orang)</i>
Nelayan (<i>Fisherman</i>)	98	Berkebun (<i>Garderner</i>)	88
Pegawai (<i>Servant</i>)	12	Meramu Sagu (<i>Sagoo gathering</i>)	47
Petani (<i>Farmer</i>)	45	Membuat Kopra (<i>Copra Production</i>)	38
Lain-lain (<i>others</i>)	34	Berdagang (<i>trading</i>)	16
Jumlah (<i>Total</i>)	189	Jumlah (<i>Total</i>)	189

Sumber (*Source*) : Data Primer (*Primary data*), 2009

Wilayah yang dikelilingi oleh laut menyebabkan hampir sebagian besar penduduk di Pulau Gag menggantungkan hidupnya dengan bekerja sebagai nelayan tradisional. Tingkat pendidikan yang rendah juga menyebabkan nelayan sebagai salah satu alternatif pekerjaan, karena nelayan tradisional di daerah ini tidak menggunakan teknologi tinggi dalam penangkapan ikan, sehingga pekerjaan ini tidak memerlukan pendidikan formal. Teknik penangkapan ikan oleh masyarakat antara lain dengan menggunakan jaring, racun (akar bore), tombak, busur dan anak panah, bahan peledak dan jerat ikan.

Tingkat pendidikan yang rendah dan desakan kebutuhan ekonomi menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang konservasi sumberdaya alam, sehingga masyarakat mempunyai kebiasaan menggunakan bahan peledak dan bahan-bahan yang merusak kehidupan biota laut dalam menangkap ikan.

Pada dasarnya perairan di sekitar Pulau Gag kaya akan hasil laut berupa berbagai jenis ikan (tuna, kembung, samandar, bobara, kurisi, baronang, hiu, bulanak, lalosi, teri, udang, lobster dan teripang. Hasil perikanan selain dikonsumsi sendiri juga dijual pada masyarakat di Pulau Gag dan pengepul yang datang dari Sorong baik berupa ikan segar maupun ikan asin. Kurangnya teknologi untuk pengawetan ikan terkadang

menyebabkan rendahnya harga jual ikan di tingkat nelayan. Harga jual selain dipengaruhi oleh kualitas ikan juga dipengaruhi oleh permintaan maupun penawaran di pasaran.

Penunjukkan kawasan Raja Ampat sebagai Suaka Margasatwa Laut oleh Kementerian Kehutanan juga membatasi akses masyarakat untuk memanfaatkan laut sebagai sandaran mata pencaharian. Selain itu juga menutup kemungkinan terbukanya lapangan kerja di sektor perikanan, karena investasi bidang kelautan, seperti penangkapan ikan dan pengalangan oleh perusahaan asing seperti di Sorong, tidak mungkin dilakukan di daerah ini. Walaupun seperti diketahui laut-laut di perairan Papua, pada umumnya mengandung kekayaan laut yang bernilai ekonomis tinggi. Penunjukan kawasan ini sebagai kawasan konservasi laut akan menyebabkan pembatasan akses terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena kawasan konservasi hanya dapat diperuntukkan sebagai tempat pendidikan dan penelitian.

Selain bekerja sebagai nelayan umumnya masyarakat di Pulau Gag juga mempunyai pekerjaan sampingan berkebun. Kondisi tanah yang tandus dan berbatu menyebabkan tidak ada tanaman yang bisa dijadikan komoditas perdagangan. Hasil kebun umumnya hanya digunakan secara subsisten dan dijual antar warga. Tanaman yang ditanam merupakan tanaman konsumsi masyarakat antara lain : kangkung (*Ipomoea spp*), keladi (*Colocasia esculanta*), singkong (*Manihot utilisima*), ubi jalar (*Ipomoea batatas*), pinang (*Areca cattechu*), cabai (*Capsicum anuum*), tomat (*Solanum tuberosum*) dan aneka tanaman pekarangan (bumbu dapur) seperti jahe (*Zingiber officinale*), kunyit (*Curcuma domestica*), lengkuas (*Alpinia galanga*), sereh (*Andropogon nardus*) dan pandan (*Pandanus amaryllifolius*). Selain itu masyarakat juga menanam tanaman perdagangan seperti coklat (*Theobroma cacao*), kopi (*Coffea sp*) dan cengkeh (*Eugenia aromatica*) walaupun dalam kuantitas yang kecil dan tidak terlalu berorientasi terhadap pasar.

Letak kebun umumnya jauh dari pemukiman dan terletak di hutan sekunder. Pada umumnya masyarakat melakukan kegiatan berkebun sebagai usaha sampingan selain pekerjaan utama baik sebagai nelayan atau pegawai. Kegiatan berkebun dilakukan ketika cuaca tidak mengijinkan untuk melaut dan hari-hari libur untuk pegawai. Hal ini dilakukan karena hasil kebun hanya untuk memenuhi kebutuhan nabati. Sistem pertanian masyarakat di Pulau Gag adalah pertanian menetap, berkaitan dengan sistem pemilikan dan penguasaan tanah.

Disamping berkebun masyarakat di Pulau Gag juga memproduksi sagu sebagai makanan pokok seperti kebanyakan suku-suku di kawasan timur Indonesia umumnya. Pohon sagu (*Metroxylon sagoo*) tumbuh secara merata di kawasan Pulau Gag terutama di daerah rawa, sehingga untuk memperoleh sagu tidaklah sulit. Kegiatan meramu sagu dilakukan selain untuk dikonsumsi sendiri juga dijual keluar Pulau Gag. Kegiatan ini biasanya dikerjakan dalam satu keluarga, seperti halnya dalam berkebun atau membuat kopra. Distribusi peran dilakukan berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki umumnya bertugas untuk memilih dan menebang pohon sagu, sedangkan perempuan bertugas *meremas* sagu. Kegiatan meramu sagu merupakan bagian dari kegiatan yang sehari-hari dilakukan oleh masyarakat disamping mencari ikan, berkebun dan membuat kopra.

Bagi masyarakat petani dan peramu sagu, penetapan Kepulauan Raja Ampat sebagai kawasan konservasi, menyebabkan terhentinya operasional perusahaan nikel di Pulau Gag. Banyaknya karyawan yang di-PHK menyebabkan berkurangnya penduduk di Pulau Gag, karena sebagian besar membawa pulang keluarganya. Hal ini berakibat pada semakin sulitnya pemasaran hasil kebun dan sagu. Pasar, sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli juga bubar, karena tidak ada pembeli lagi.

Salah satu mata pencaharian masyarakat di Pulau Gag adalah membuat kopra, yaitu kelapa (*Cocos nucifera*) yang dikeringkan dengan cara diasapi, karena banyaknya pohon kelapa yang tumbuh di hampir seluruh daratan Pulau Gag. Kegiatan membuat kopra dilakukan di kebun yang letaknya terpisah dan jauh dari pemukiman warga, sehingga umumnya masyarakat akan membuat pondok beserta tungku pemasak kopra di tengah kebun serta menginap sehari-hari di tempat tersebut.

Pekerjaan membuat kopra dilakukan oleh suatu keluarga besar yang terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak yang sudah menikah. Pembagian kerja dilakukan berdasar jenis kelamin. Laki-laki melakukan pekerjaan memetik kelapa dengan memanjat pohonnya dan menguliti sabut kelapa, sedangkan kaum perempuan mengupas tempurung kelapa, mengumpulkan airnya dan mengasapi daging buah di tungku yang sudah disediakan. Pekerjaan ini umumnya dilakukan selama 2 – 3 minggu lalu tiba masa istirahat untuk memberi kesempatan pohon kelapa memproduksi kembali. Sambil menunggu kelapa siap dipetik, para pembuat kopra kembali menjalankan aktivitas di kebun, mencari ikan dan hasil laut, meramu sagu dan lain-lain.

Bagi masyarakat pembuatan kopra juga menambah penghasilan rumah tangga, selain dari usaha tani dan mencari ikan. Kesulitannya adalah dalam hal pemasaran.

Pada umumnya masyarakat memasarkan pada para pengepul yang ada di Pulau Gag, sehingga hanya memperoleh untung sedikit. Dibandingkan jika langsung dibawa ke Sorong, untung yang diperoleh lebih besar, namun harus mengeluarkan ongkos angkut yang lebih besar. Kesulitan yang lain adalah jika cuaca hujan berhari-hari, maka pengeringan kelapa akan terhambat.

Jarak Pulau Gag dengan Kota Sorong 150 km dan hanya dapat ditempuh dengan transportasi laut. Apabila menggunakan speed boat jarak tempuhnya kurang lebih 4 jam, dalam waktu 2 kali dalam sebulan biasanya ada speed boat milik perusahaan PT. Gag Nikel yang melayari rute Sorong – Pulau Gag pulang pergi, namun hanya untuk kalangan terbatas. Pengoperasian speedboat perusahaan dilakukan untuk mendukung *maintenance* perusahaan di pulau Gag selama keputusan terhadap status pulau Gag belum selesai.

Walaupun secara operasional pertambangan, PT. Gag sudah tidak melakukan eksplorasi lagi, namun keberadaannya di Pulau Gag masih ada sampai sekarang untuk melakukan pengambilan sampel penelitian kandungan nikel. Jumlah karyawan yang ada pun tidak sebanyak dulu lagi.

Sedangkan apabila menggunakan kapal perintis dengan ongkos Rp 75.000,- memerlukan waktu satu hari satu malam, karena kapal harus singgah di beberapa tempat. Kapal perintis dari Halmahera menuju Sorong ini biasanya akan lewat dan singgah di Pulau Gag dalam waktu 3 minggu sekali. Sulitnya perhubungan dan tingkat perekonomian yang rendah menyebabkan mobilitas penduduk tergolong rendah, karena umumnya masyarakat jarang sekali bepergian walaupun dalam kurun waktu satu tahun pun.

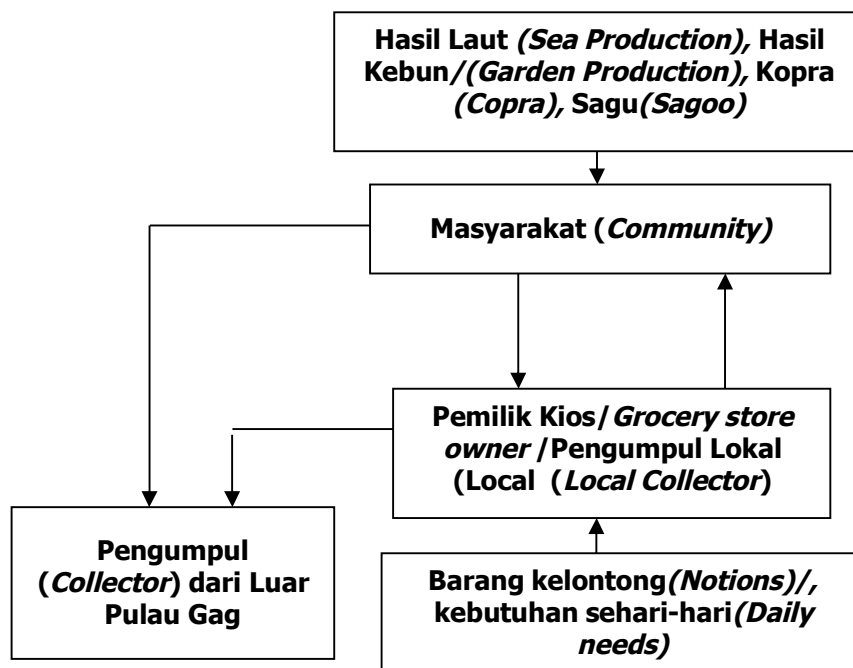
Sarana komunikasi yang menghubungkan Pulau Gag dengan dunia luar berupa telephon satelit dan SSB milik PT. Gag Nikel. Sedangkan sarana informasi masyarakat berupa radio dan Televisi yang hanya dimiliki beberapa orang warga (karyawan perusahaan) karena selain harus memakai antena parabola juga ketersediaan listrik yang sangat terbatas. Masyarakat menikmati listrik pada malam hari antara pukul 18.00 – 00.00 WIT atas bantuan dari PT. Gag Nikel. Terbatasnya aksesibilitas komunikasi dan transportasi merupakan salah satu faktor ketertinggalan masyarakat dalam pembangunan.

Perputaran uang di Pulau Gag sangat rendah sekali. Tidak ada pasar dan hanya terdapat beberapa kios yang menyediakan kebutuhan masyarakat. Pada umumnya masyarakat jarang sekali memiliki uang tunai, sehingga untuk memperoleh barang-

barang yang dibutuhkan dari kios maka masyarakat akan berhutang dulu dan akan dibayar ketika memperoleh hasil baik dari nelayan, berkebun, membuat kopra atau meramu sagu.

Sebagian besar transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat cenderung menggunakan sistem barter dengan standar harga pasaran, karena kebetulan para pemilik kios juga merupakan pedagang pengumpul/pengepul (*collector*). Hasil bumi yang *dibarterkan* pada pemilik kios antara lain adalah kopra, cengkeh, kakao, sagu, ikan asin, teri *puri* kering, teripang (*Sea cucumber*). Hasil bumi tersebut adalah sebagai penukar barang-barang kelontong maupun kebutuhan hidup sehari-hari yang sebelumnya telah diambil masyarakat antara lain beras, gula, garam, minyak goreng, rokok dan lain-lain.

Pemasaran hasil bumi Pulau Gag selain lewat pemilik kios sebagai pengumpul lokal. Datangnya para pengumpul dari luar Pulau Gag yang datang secara periodik baik dari Pulau Gebe, Ternate maupun dari Bitung dengan menumpang kapal perintis yang masuk Pulau Gag setiap 3 minggu sekali. Demikian halnya pengumpul dari Sorong akan datang pada saat kapal perintis tersebut kembali dari Sorong untuk melanjutkan rutennya kembali ke Bitung. Aliran tata niaga hasil bumi yang berlangsung pada masyarakat Kampung Gambir dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar (Figure) 1. Alur Tata Niaga di Pulau Gag, Raja Ampat (*Flow on Commerce at Gag Island, Raja Ampat*)

C. Sejarah dan Budaya

Nama Pulau Gag berdasarkan mitologi masyarakat setempat berasal dari kata *gag* yang berarti teripang (*Sea cucumber*) dalam Bahasa Weda, salah satu bahasa yang digunakan oleh penduduk di Kepulauan Halmahera. Hal ini disebabkan karena pendatang pertama yang masuk ke daerah ini melihat begitu banyaknya teripang di perairan Pulau Gag. Pulau Gag sebelumnya merupakan pulau yang tidak berpenghuni dan hanya digunakan untuk berkebun. Penduduk pertama Pulau Gag berasal dari Pulau Gebe yang awalnya datang untuk mencari dan membuka lahan pertanian (berkebun).

Sebelumnya terdapat perkampungan kuno yang disebut Kampung Lama yaitu perkampungan yang ada pada masa awal kedatangan penduduk pertama. Kampung tersebut sekarang sudah ditinggalkan penduduk karena sebagian besar penduduk memilih bermukim di Kampung Gambir (Kampung Baru) yang lokasinya lebih strategis karena berdekatan dengan kompleks perusahaan, sehingga fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat lebih dekat seperti dermaga, fasilitas listrik dan air, sekolah dan kesehatan.

Asal mula berkembangnya pemukiman di Pulau Gag dimulai pada saat kemenangan pasukan Trikora yang berdatangan sekembalinya Irian Jaya kepangkuan NKRI, pada tahun 1963. Kata Gambir berasal dari kata gembira dalam Bahasa Indonesia sebagai ungkapan rasa suka cita atas kembalinya Pulau Gag sebagai bagian wilayah Irian Jaya kepada NKRI. Kedatangan pasukan Trikora di Pulau Gag juga diikuti dengan kedatangan pendatang yang ingin mengadu nasib bekerja di pertambangan nikel.

Eksplorasi nikel di Pulau Gag telah ada sejak jaman kolonial Belanda. Ketika Belanda meninggalkan Indonesia dan kembalinya Irian Jaya ke pangkuan RI, serta terjadinya nasionalisasi perusahaan milik Belanda pada tahun 1972, penambangan nikel dilanjutkan oleh PT. Pasifik Nikel (perusahaan PMA dari AS) sampai dengan tahun 1981. Selanjutnya pertambangan nikel dikelola oleh PT. Aneka Tambang (salah satu BUMN) yang kemudian melakukan kontrak kerjasama dengan PT. BHP Biliton (perusahaan PMA dari Australia) pada tahun 1995 dengan pembagian saham 3 : 1, yaitu 75% dimiliki oleh PT. BHP Biliton dan 25% dimiliki oleh PT Aneka Tambang.

Dalam perkembangan selanjutnya PT. BHP Biliton menggandeng partner kerja *Falcon Bridge* (perusahaan penambangan PMA asal Canada) dengan kepemilikan

saham 37% dari seluruh proyek nikel di Pulau Gag. Manajemen dan operasional pertambangan nikel di Pulau Gag selanjutnya dikelola oleh PT. Gag Nikel yang melakukan eksplorasi dan pengambilan sampel.

Pada tahun 1999 PT. Gag Nikel mulai menghentikan kegiatan eksplorasinya bersamaan dengan keluarnya UU No 41 Tahun 1999 dan issue penetapan Pulau Gag sebagai hutan lindung. Walaupun eksplorasi pertambangan sudah tidak dilakukan namun keberadaan perusahaan masih ada dan hanya melakukan kegiatan pengambilan sampel. Hal ini berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi Pulau Gag, karena terhentinya operasional pertambangan menyebabkan PHK pada sejumlah karyawannya, sehingga menambah pengangguran dan mengurangi perputaran uang tunai yang ada di Pulau Gag.

Sebagian besar mantan karyawan dan keluarganya meninggalkan daerah ini karena tidak mempunyai penghasilan lagi. Pengaruh nyata yang nampak adalah tidak ada lagi pasar desa, tempat bertemu dan bertransaksinya para penjual dan pembeli. Tidak adanya pasar juga menyebabkan berkurangnya perputaran uang tunai di Pulau Gag.

Secara formal sebagian besar masyarakat Pulau Gag memeluk agama Islam secara turun temurun. Namun kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang berbau magis sampai sekarang tidak dapat dihilangkan. Hal tersebut tercermin dari fenomena-fenomena ritual magis yang masih berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Ritual yang berasal dari tradisi adat antara lain dilakukan pada hal-hal yang berkaitan dengan siklus hidup seseorang seperti kelahiran, perkawinan dan kematian.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sangat berpengaruh terhadap persepsi tentang keberadaan pertambangan nikel dan konservasi kawasan.
2. Tingkat pendidikan yang relatif rendah mempengaruhi perekonomian keluarga dan pemahaman masyarakat terhadap konservasi kawasan.
3. Isolasi geografis yang diakibatkan karena sulitnya transportasi menuju dan dari Pulau Gag mempengaruhi perekonomian dan pendapatan masyarakat serta

menghambat informasi dan komunikasi, sehingga berakibat pada kurangnya pemahaman makna konservasi kawasan.

4. Sulitnya perekonomian mendorong tingginya animo masyarakat terhadap keberlanjutan pertambangan nikel yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan mereka tanpa memperdulikan dampak ekologisnya di masa mendatang.

B. Saran

1. Perlu adanya kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang makna konservasi kawasan kepada masyarakat.
2. Perlu adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk memperbaiki pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- McKenna, S. A, G. R. Allen and Suer Suryadi, 2002. A Marine Assessment Rapid Assessment of the Raja Ampat Islands, Papua Province, Indonesia. Conservation International.
- Departemen Kehutanan, 1993. Peranan BPKH dalam Pembangunan Planologi Kehutanan. www.dephut.go.id Diakses tanggal 25 April 2007.
- Departemen Kehutanan, 1993. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 81/Kpts-II/1993 tanggal 16 Februari 1993, tentang Daftar Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Konservasi. www.dephut.go.id Diakses tanggal 25 April 2007.
- Departemen ESDM, 2001. UU No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua. www.esdm.go.id. Diakses tanggal 4 Desember 2012
- Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua, 2004. Prospek Mineral. www.distamben.papua.go.id. Diakses tanggal 4 Desember 2012.
- Jatam, 2006. Pesona Kepulauan Raja Ampat dan Ancaman Industri Tambang. www.jatam.org/indonesia/case/gn. Diakses tanggal 24 April 2006.
- Kelompok Studi Mahasiswa Kelautan UGM, 2010. Pulau Gag, Kepulauan Rajaampat Papua Barat. www.kskbiogama.worldpress.com. Diakses tanggal 4 Desember 2012.
- Kementerian Kehutanan, 1999. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. www.dephut.go.id Diakses tanggal 4 Desember 2012.

Lamatenggo, Y.N. 2002. Kajian Potensi dan Pengelolaan Pulau-pulau Kecil. www.repository.ipb.ac.id Diakses tanggal 4 Desember 2012

MinergyNews, 2001. Tolak Pertambangan Di Kawasan Hutan Lindung dan Konservasi. Gali-gali Volume 3, Nomor 16, Oktober 2001. www.minergynews.com. Diakses tanggal 20 April 2007.